

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2024 sebesar 126.171 jiwa. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya tekanan terhadap kebutuhan ruang permukiman yang berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Kondisi ini ditandai dengan bertambahnya luas lahan terbangun berdasarkan data *GHS-Built* sebesar 9.557,48 Ha (41%) dan lahan pertanian mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga tahun 2024 sebesar 4.398,34 Ha atau 18,39%. Dinamika pertumbuhan serta perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa diperlukan suatu perencanaan pengembangan permukiman yang mampu mengakomodasi kebutuhan ruang dan menjaga keseimbangan baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Rencana pengembangan permukiman tahun 2046 diidentifikasi berdasarkan 2 jenis permukiman yaitu rencana permukiman perkotaan dan perdesaan. Penentuan deliniasi kawasan perkotaan dan perdesaan menggunakan 3 variabel yaitu distribusi populasi, lahan terbangun, dan klasifikasi desa-kota menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Variabel distribusi populasi di Kabupaten Semarang terbagi ke dalam 3 klasifikasi meliputi *Urban Centre*, *Urban Cluster*, dan *Rural Cluster*. Variabel selanjutnya yaitu lahan terbangun yang didapatkan dari *GHS-Built* resolusi 100 m x 100 m untuk mengetahui wilayah dengan proporsi lahan bangunan >50% sebagai salah satu ciri perkotaan. Hasil deliniasi kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa terdapat 99 desa berstatus perkotaan dan 136 desa berstatus perdesaan.

Rencana pengembangan permukiman memperhatikan luas kebutuhan lahan di tahun rencana berdasarkan proyeksi penduduk baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Hasil proyeksi penduduk kawasan perkotaan Kabupaten Semarang pada tahun 2046 yaitu 747.667 jiwa yang berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan permukiman perkotaan baru sebesar 603,30 Ha. Sementara, hasil proyeksi penduduk kawasan perdesaan yaitu 656.353 jiwa yang berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan permukiman perdesaan baru sebesar 518,61 Ha.

Sementara itu, lahan yang tersedia di Kabupaten Semarang ditentukan berdasarkan eliminasi total luas lahan dengan faktor limitasi. Berdasarkan pengolahan tersebut, diketahui bahwa luas lahan yang tersedia yaitu seluas 15.580,42 Ha atau sekitar 15% dari total luas wilayah. Kemudian hasil identifikasi lahan yang tersedia di overlay dengan kesesuaian lahan untuk permukiman. Deliniasi kesesuaian lahan permukiman di lahan yang tersedia dijadikan sebagai rencana pengembangan permukiman yaitu seluas 15.532,20 Ha. Alokasi rencana pengembangan permukiman di kawasan perkotaan sebesar 7.520,45 Ha atau 48% dan pengembangan permukiman di kawasan pedesaan sebesar 8.011,71 Ha atau 52%. Deliniasi rencana pengembangan permukiman menunjukkan bahwa lahan yang tersedia dan dapat dikembangkan sebagai permukiman masih mampu memenuhi kebutuhan lahan permukiman baru dan fasilitas penunjang pada tahun 2046. Rencana pengembangan permukiman untuk kawasan perkotaan dan pedesaan ini diharapkan dapat mewujudkan pengembangan wilayah berkelanjutan di Kabupaten Semarang pada tahun 2046 mendatang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Permukiman Perkotaan Pedesaan Kabupaten Semarang Tahun 2046, berikut rekomendasi yang dapat diberikan pada peneliti selanjutnya.

- Penyusunan rencana pengembangan permukiman harus mempertimbangkan kemampuan lahan untuk pembangunan, kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan. Kesesuaian lahan permukiman memiliki beberapa klasifikasi, maka utamakan pada kesesuaian lahan yang sangat sesuai hingga cukup sesuai sebagai wilayah yang dikembangkan agar tidak terjadi adanya alih fungsi lahan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan rendah atau tidak sesuai untuk pengembangan permukiman.
- Faktor limitasi yang digunakan sebagai faktor pembatas untuk menentukan ketersediaan lahan dapat disesuaikan dengan wilayah studi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang tersedia mampu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang akan datang. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Semarang kedepannya karena hasil rencana pengembangan permukiman merupakan lokasi yang cocok dengan berbagai variabel penentunya.

- Deliniasi perkotaan dapat diterapkan pada setiap wilayah. Namun, peneliti lebih lanjut dapat mengembangkan dengan melibatkan variabel tambahan yang mencirikan kawasan perkotaan serta metode validasi yang digunakan termasuk melibatkan pihak berwenang setempat dan partisipasi masyarakat.
- Penggunaan metode penentuan kawasan perkotaan harus dilakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan data serta menggunakan data terbaru dan resolusi yang sesuai dengan skala wilayah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat serta pembaharuan data *GHS-POP* dan *GHS-BUILTS* pada tahun data dan resolusi data, serta alat pengolahan yang dapat mengolah hingga resolusi tertentu.